

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH)
DI NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH :

**RAHMAT HIDAYAT
TM/NIM : 2009/97304**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLTIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

Persetujuan Ujian SKHPSI

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Nagari Talo Sotang Kanyil Kabupaten Solok Selatan

Nama : Rahmat Hidayat

TM/NIM : 2009/97304

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2014

(Disetujui oleh)

Pembimbing I



Aditya Khairul, M.A.P.A., Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Maria Motesaon, M.P.A., M.Si
NIP. 19600202 198403 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah diperbaharui di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, 03 April 2014 pukul 16.00 s.d 12.00 WIB

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Pembiayaan Listrik Tenaga
Mikro Hidro (PLTMH) Di Nagari Tuhon Sengat Kanyit
Kabupaten Solok Selatan

Nama : Rahmat Hidayat
TM/NIM : 2009097304
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2014

Tim Penguji :

	Nama
Ketua	: Alriya Khaidir, MAPA, Ph.D
Sekretaris	: Dr. Hj. Maria Muntesari, MEd, M.Si
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maari, M.Si
Anggota	: Dr. Fuimariza, M. Hum
Anggota	: Nera Eka Putri, S.IP, M.Si

Tanda Tangan



Megestikan :
Jalan FIS UNP



Prof. Dr. Syahrul Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Hidayat

TM/NIM : 2009/97304

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pembudayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Pemangkkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Nagari Talas Sungai Kanyit Kabupaten Solok Selatan" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, April 2014
Saya yang menyatakan,


Rahmat Hidayat
2009/97304



ABSTRAK

RAHMAT HIDAYAT : TM/NIM : 2009/97304. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) DI NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT KABUPATEN SOLOK SELATAN.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat miskin khususnya yang belum mendapatkan pelayanan listrik di rumah-rumahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunyit, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Talao Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan. Dengan kategorisasi penelitian yaitu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dapat dikelompokkan dalam 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat seperti telah diteranginya rumah-rumah dan juga termasuk sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan rumah ibadah dan masyarakat dapat membuka beberapa jenis usaha seperti usaha warung makanan, usaha pengisian air minum isi ulang, usaha warung nasi, usaha bengkel otomotif dan usaha perabot kayu. Namun kegiatan tersebut menghadapi kendala, yaitu masih banyaknya warga yang belum memanfaatkan listrik sebagai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan terus memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat untuk bisa lebih jeli dalam membuka usaha baru dan tidak hanya fokus terhadap profesi berkebun dan berladang sehingga hasil dari program pemberdayaan masyarakat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Nagari Talao Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan”**. Salawat dan salam dimohonkan kepada-Nya untuk dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana satu (S1) dengan gelar Sarjana Administrasi Publik pada jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkenan memberikan izin penelitian ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang yang memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini.

4. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd.,Ph.D sebagai pembimbing akademis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan serta sebagai inspiratif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibuk Dr. Hj. Maria Montessori, M.Ed, M.Si selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan memberi masukan serta motivator bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani,M.Si dan Ibuk Dr. Fatmariza, M. Hum, Ibuk Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh staf pengajar FIS UNP khususnya staf pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS UNP.
9. Bapak Jupni M sebagai Wali Nagari Talao di Nagari Talao Sungai Kunit yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
10. Bapak dan ibuk selaku pelaksana kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
11. Masyarakat Nagari Talao Sungai Kunit yang telah memberikan informasi.

12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku serta seluruh keluarga. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman program studi Ilmu Administrasi Negara UNP khususnya angkatan 2009 terima kasih atas semuanya yang telah kalian berikan.
14. Semua teman-teman yang telah memberi dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyempurnakan skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan dalam penulisan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Khazanah Ilmu Pengetahuan yang penulis miliki.

Padang, 2014

Rahmat Hidayat

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Pembatasan, Rumusan Masalah.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian teoritis.....	9
1. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat	9
2. Program PNPM Perdesaan PLTMH	19
B. Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	32
1. Jenis dan Sumber Data	32
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	33
E. Uji Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	39
1. Karakteristik Nagari Talao Sungai Kunyit.....	39
2. Proses dan Cara Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunyit	43
3. Organisasi Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunyit.....	46
B. Temuan Khusus.....	52
1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunyit	53
2. Manfaat dan Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Terhadap Masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit	66
3. Kendala dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunyit	79
4. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunyit	83
C. Pembahasan.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Nagari Talao Sungai Kunyit Tahun 2012.....	40
Tabel 4.2 Lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Tahun 2012.....	41
Tabel 4.3 Jumlah Keluarga Sejahtera di Nagari Talao Sungai kunyit Tahun	42
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit	48
Tabel 4.5 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Adanya Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Nagari Talao Sungai Kunyit	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Warung	67
Gambar 4.2 Warung Pengisian Air Minum Isi Ulang	69
Gambar 4.3 Warung Nasi	70
Gambar 4.4 Bengkel Otomotif	72
Gambar 4.5 Usaha Perabot Kayu	73
Gambar 4.6 Usaha Perabot Kayu	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Penelitian

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang di dunia, akan tetapi masih terdapat banyak masalah yang dihadapi Negara Indonesia, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu standar tingkat kehidupan yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Isjoni,2002:54). Mengingat kondisi Indonesia sampai tahun 2011 tingkat kemiskinan nasional mencapai 12,49 persen, untuk itu perlunya peran dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, seperti kurang mengertinya pemerintah tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya sehingga apa yang dilakukan pemerintah tidak bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Sedangkan masyarakat juga kurang berperan aktif dalam memberikan aspirasi kepada pemerintah pusat maupun daerah tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka. Seperti masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana jembatan untuk menghubungkan desa mereka dengan desa tetangga untuk memperlancar perekonomian mereka tetapi masyarakat kurang berperan aktif untuk memberikan masukan untuk membuat jembatan baru kepada pemerintah daerah atau pusat. Sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam

memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 yaitu “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Sehingga pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab memberdayakan masyarakat lemah sehingga mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Pada dasarnya program pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga, dinas dan instansi-instansi yang terkait baik pusat maupun daerah seperti peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur. Program tersebut merupakan suatu usaha pemerintah pusat dalam memberikan dan menyediakan kesejahteraan yang layak kepada masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat secara substansi berarti proses memajukan, mengembangkan dan memperbesar kemampuan masyarakat. Masyarakat bukan saja diarahkan pada kemajuan fisik mereka seperti lahan pertanian, irigasi, tempat peristirahatan dan penyediaan pangan masyarakat namun juga pada kemajuan non fisik seperti membangun puskesmas, rumah ibadah, jembatan, pembangkit listrik dan pembangunan yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat.

Hal tersebut dapat membuat masyarakat bisa memenuhi kebutuhan moril maupun materil kehidupan mereka yang akan mana akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini juga harus didukung penuh oleh pemerintah untuk bisa mengatasi masalah kemiskinan di dalam masyarakat, karena itu diperlukan hubungan yang erat antara masyarakat dengan pemerintah sehingga pemerintah bisa membuat suatu cara atau strategi berupa pemberdayaan

yang berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Nagari Talao Sungai Kunyit merupakan salah satu Nagari dari 39 Nagari di Kabupaten Solok Selatan yang berada dalam Kecamatan Sangir Balai Janggo. Nagari Talao Sungai Kunyit berdiri secara defenitif pada tanggal 21 Desember 2006 dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Solok Selatan nomor 140.01.285-2006. Secara Geografis Nagari Talao Sungai Kunyit terletak pada posisi $1^{\circ}20'00''$ sampai dengan $1^{\circ}40'00''$ lintang selatan dan antara $101^{\circ}25'00''$ sampai dengan $101^{\circ}40'00''$ bujur timur dengan luas wilayah 173,24 km². (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat)

Untuk memenuhi kebutuhan primer, masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit bekerja di perusahaan milik swasta di sekitar nagari tersebut. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan hanya sebagai buruh kasar. maka masyarakat tersebut tidak bisa digolongkan kepada masyarakat yang sejahtera. Jumlah keluarga prasejahtera di Nagari Talao Sungai Kunyit sebanyak 92 keluarga. Sedangkan keluarga sejahtera hanya berjumlah 74 keluarga. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan). Kebutuhan listrik juga tidak memadai, masyarakat nagari Talao Sei Kunyit hanya diterangi oleh lampu yang berasal dari mesin pembangkit listrik yang dimilikinya. Tapi tidak semua masyarakat memiliki mesin tersebut sehingga sebagian masyarakat nagari Talao Sei Kunyit hidup dalam kegelapan. Hal ini mengindikasikan banyaknya keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan.

Masyarakat di nagari Talao Sungai kunyit belum bisa memanfaatkan aliran listrik untuk meningkatkan kesejahteraannya, seperti : sulit terlaksananya kegiatan kemasyarakatan, usaha warungan belum bisa buka hingga malam hari, anak-anak belum bisa belajar mengaji di mesjid, masyarakat belum bisa memperoleh informasi dan pengetahuan dari televisi, dan masyarakat belum bisa melaksanakan aktivitas di malam hari yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat di nagari Talao Sungai kunyit rendah.

Namun untuk mengatasi permasalahan listrik tersebut, tahun 2010 pemerintah pusat memberikan bantuan dana dalam ruang lingkup PNPM-Perdesaan dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang memanfaatkan tenaga Mikro Hidro. Dalam hal ini pemerintah melalui badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BPM, PPr dan KB) Kabupaten Solok Selatan memberikan dana kepada masyarakat untuk mewujudkan penerangan yang memadai untuk pemukimannya. Dengan program tersebut banyak manfaat yang dirasakan warga, diantaranya berbagai aktivitas dapat dilakukan di malam hari, seperti kegiatan kemasyarakatan, usaha warungan bisa buka hingga malam hari, anak-anak bisa belajar mengaji di mesjid, dan menikmati televisi, kehidupan masyarakat di nagari Talao Sungai Kunyit yang dulu hidup dalam kegelapan tapi sekarang masyarakat bisa hidup dengan sejahtera karena masyarakat telah bisa menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan listrik. Program tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat pertama yang terlaksana di kabupaten Solok Selatan yang berbasis program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Sehingga itulah alasan penulis mengambil lokasi penelitian di nagari Talao Sungai Kunyit yang mana program pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang pertama kali terlaksana di Kabupaten Solok Selatan. Dan juga Nagari Talao Sungai Kunyit merupakan nagari yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN sehingga dengan adanya program tersebut Nagari Talao Sungai Kunyit telah bisa merasakan listrik dan membuat masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit tidak hidup dalam kegelapan lagi.

Memperhatikan permasalahan di atas maka kedudukan evaluasi pengelolaan program sangat penting guna menentukan tingkat perkembangan PNPM sebagai sarana belajar warga masyarakat. Kondisi ini mendorong penulis ingin mengkaji masalah ini dengan judul: **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Nagari Talao Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan.”**

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
- b. Banyaknya masyarakat miskin yang belum berdaya.
- c. Kurang berperan aktifnya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

- d. Belum adanya upaya yang maksimal dari pemerintah dalam proses Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Masyarakat perdesaaan belum mendapatkan pelayanan listrik yang memadai.
- g. Masyarakat di nagari Talao belum bisa memanfaatkan aliran listrik untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan pembatasan masalah pada pelaksanaan program, kendala-kendala dalam pelaksanaan program, dan upaya - upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program bantuan melalui program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit kabupaten Solok Selatan.

- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit kabupaten Solok Selatan.
- c. Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit kabupaten Solok Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit kabupaten Solok Selatan
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit kabupaten Solok Selatan
3. Mengidentifikasi upaya – upaya dalam pelaksanaan program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Talao Sungai Kunyit kabupaten Solok Selatan

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas dapat dipenuhi, maka manfaat yang akan diperoleh yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan program Pemberdayaan Masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang.
- b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ada hubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang selalu berperan sebagai monitoring dan evaluating.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan seringkali dijadikan kata kunci bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. Upaya yang dilakukan ialah meningkatkan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan dan mendinamiskan potensi dan memberdayakannya. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment* yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.

Menurut Alfitri (2011:23) “Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai *power* dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri”. Saraswati (dalam Alfitri, 2011:23) mengatakan secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut :

- a. *Learning by doing*. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan kongkrit yang terus-menerus dampaknya dapat terlihat.
- b. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- c. *Self evaluation*. Pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.

- d. *Self development and coordination*. Artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- e. *Self selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan.
- f. *Self decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

Keenam unsur tersebut merupakan penguat dalam proses pemberdayaan, jika dilakukan secara terus-menerus maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan proses tersebut dapat berjalan dengan sendirinya. Soetomo (2009:418) juga berpendapat bahwa ada dua unsur penting dari pemberdayaan adalah desentralisasi dan pengembangan kapasitas. Sedangkan Winarni (dalam Kasim 2006:151), mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi 3 hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian.

Pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang terbatas dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Alfitri (2011:29) mengatakan bahwa pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan atau dikenal dengan konsep *people-centered development*.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soetomo (2009:418) yang mana diperlukan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan secara lebih mandiri. Untuk maksud tersebut di samping diperlukan peluang, kesempatan dan kewenangan juga kemampuan, yang kesemuanya memerlukan proses yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*). Dilihat dari aspek manusia sebagai aktor utama proses pembangunan pemberdayaan juga dapat berarti proses pengaktualisasikan potensi manusia. Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena diperlukan pendekatan seperti :

- a. *Authority* atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
- b. *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
- c. *Truth* atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
- d. *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan

sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

- e. *Responsibility* atau tanggung jawab, yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
- f. *Support* atau dukungan, yakni adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat yang lebih baik.

Masyarakat perlu diberdayakan untuk tidak menimbulkan ketergantungan. Sebab apabila hal ini terjadi maka akan menjadi beban bagi negara. Disamping itu, apabila masyarakat kuat dalam hal kewenangannya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan juga akan membawa dampak yang positif dari sisi masyarakat maupun negara itu sendiri. Menurut Sunyoto (2004) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Masyarakat dibantu dalam merancang kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan mengimplementasikan rancangan tersebut sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Sedangkan menurut Soetomo (2009:417) “pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memberikan kewenangan kepada masyarakat sampai pada tingkat terbawah, khususnya masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan

pembangunan”. Dan Soetomo (2009:427) salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin melalui partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri atau membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Perubahan perilaku ini apabila dipadukan dengan sumber daya alam yang tersedia, akan melahirkan perilaku baru yang disebut partisipasi. Partisipasi ini akan merangsang masyarakat lebih aktif dan kreatif melaksanakan pembangunan yang terarah dan berencana terutama dalam meningkatkan pendapatan serta membuka lapangan kerja baru untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Tujuan pemberdayaan menurut Ambar (dalam Kasim 2006:100), adalah “untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berfikir bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut”. Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukanlah kegiatan yang sifatnya *top-down* yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya *bottom-up* yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

Pelaksanaan suatu program dapat dilihat melalui 2 cara yaitu dengan bentuk *top down* dan *bottom up*. Pelaksanaan secara *top down* merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan dimana semua alur baik dalam bentuk ide, bentuk kegiatan dan dana berasal dari pemerintah pusat, disini masyarakat hanya menerima apa yg telah ditentukan oleh pemerintah. Pelaksanaan secara *bottom up* merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan dimana masyarakat dituntut untuk memberi ide dan masukan tentang kegiatan apa yang cocok dilaksanakan di daerah tempat mereka tinggal. Pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up* contohnya adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan suatu program pemerintah yang bersifat *bottom up*.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dasar hukum yang mengatur program pemberdayaan masyarakat tersebut ialah landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan prinsip dasar dari program tersebut ialah mengacu pada Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mana pelaksanaan program senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dan kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan. Sehingga dalam program tersebut terlihat peran dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan

daerah dan masyarakat itu sendiri. Sehingga tujuan utama yang diinginkan oleh pemerintah untuk masyarakatnya bisa tercapai secara maksimal.

Salah satu tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat tersebut ialah pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang yang mana tingkat kehidupannya berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum dan seseorang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Jumlah warga miskin pada setiap kali kemunculannya selalu berubah dan berbeda satu sama lain. Sudah barang tentu hal ini menuntut adanya kriteria atau indikator yang sama bagi keluarga miskin yang benar-benar tepat yang bisa memberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan data yang betul-betul akurat. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur suatu kemiskinan.

Departemen Sosial (2006), menetapkan delapan indikator yang dapat dijadikan patokan dalam mengukur apakah sebuah keluarga termasuk dalam golongan masyarakat miskin, yaitu :

- a. Penghasilan rendah, atau berada dibawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per-orang per-bulan berdasarkan standar BPS per wilayah propinsi dan kabupaten/kota.
- b. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial).

- c. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun
- d. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit
- e. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
- f. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin
- g. Tinggal di rumah yang tidak layak huni

Penyebab kemiskinan juga bisa terjadi karena gagalnya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat

miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Alangkah lebih baiknya apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta dibebaskannya biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan tersebut tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan.

Penyebab-penyebab kemiskinan tadi merupakan suatu tantangan bagi pemerintah dan rakyatnya untuk dapat menanggulangi dan mencari jalan keluarnya yang tepat bagi pemecahannya. Berdasarkan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan nasional, telah ditetapkan dua strategi utama penanggulangan kemiskinan, yaitu :

- a. Peningkatan pendapatan orang miskin.
- b. Pengurangan pengeluaran orang miskin.

Sedangkan strategi operasionalnya dilakukan melalui empat pilar, yaitu :

- a. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Peningkatan kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- d. Perlindungan sosial.

Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan melalui program-program yang telah dicanangkan, khususnya program pemberdayaan masyarakat secara serius dan tepat sasaran, sehingga kemiskinan yang melanda masyarakat dapat hilang dan membuat kehidupan masyarakat tersebut sejahtera khususnya masyarakat miskin yang berada di pedesaan.

2. Program PNPM Perdesaan PLTMH

a. Pengertian PNPM Perdesaan

PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi koordinasi dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya.

Tepatnya pada bulan Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasaran adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :

- 1) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan.
- 2) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*).
- 3) Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (*Corporante Social Responcibility*) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.

Contoh program PNPM Mandiri Perdesaan ialah Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut berhubungan dengan kelistrikan. Mengingat

arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang kelistrikan, undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah juga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui program kelistrikan seperti Program Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLMTH).

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya (*resources*) penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Biasanya Mikro hidro dibangun berdasarkan kenyataan bahwa adanya air yang mengalir di suatu daerah dengan kapasitas dan ketinggian yang memadai. Istilah kapasitas mengacu kepada jumlah volume aliran air per satuan waktu (*flow capacity*) sedangkan beda ketinggian daerah aliran sampai ke instalasi dikenal dengan istilah head. Mikrohidro juga dikenal sebagai

white resources dengan terjemahan bebas bisa dikatakan "energi putih". Dikatakan demikian karena instalasi pembangkit listrik seperti ini menggunakan sumber daya yang telah disediakan oleh alam dan ramah lingkungan. Suatu kenyataan bahwa alam memiliki air terjun atau jenis lainnya yang menjadi tempat air mengalir.

Secara teknis, mikrohidro memiliki tiga komponen utama yaitu air (sebagai sumber energi), turbin dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air (head). Semakin tinggi jatuhan air maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Di samping faktor geografis (tata letak sungai), tinggi jatuhan air dapat pula diperoleh dengan membendung aliran air sehingga permukaan air menjadi tinggi. Air dialirkan melalui sebuah pipa pesat kedalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator.

Mikrohidro bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu besar, misalnya dengan ketinggian air 2.5 meter dapat dihasilkan listrik 400 watt. Relatif kecilnya energi yang dihasilkan mikrohidro dibandingkan dengan PLTA skala besar, berimplikasi pada relatif sederhananya peralatan serta kecilnya areal yang diperlukan guna instalasi dan pengoperasian mikrohidro. Hal tersebut merupakan salah satu

keunggulan mikrohidro, yakni tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Perbedaan antara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan mikrohidro terutama pada besarnya tenaga listrik yang dihasilkan, PLTA dibawah ukuran 200 KW digolongkan sebagai mikrohidro. Dengan demikian, sistem pembangkit mikrohidro cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

c. Keuntungan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro :

- 1) Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam.
- 2) Memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan.
- 3) Tidak menimbulkan pencemaran.
- 4) Dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan.
- 5) Dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin.

d. Prinsip-prinsip PNPM Perdesaan

Prinsip-prinsip dari PNPM Perdesaan terdiri dari :

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

- 2) Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- 3) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
- 4) Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- 5) Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
- 6) Kesenjangan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
- 7) Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- 8) Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan

secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

- 9) Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- 10) Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- 11) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

e. Lokasi Sasaran PNPM Perdesaan

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kabupaten per kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kabupaten kategori bermasalah dalam PNPM-Perdesaan. Desa berpartisipasi yaitu Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Perdesaan dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan—

pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader- kader desa yang bertugas secara sukarela. Adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Perdesaan.

Kriteria desa bisa terdani adalah sebagai berikut :

- 1) Lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal.
- 2) Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan.
- 3) Dapat dikerjakan oleh masyarakat.
- 4) Didukung oleh sumberdaya yang ada.
- 5) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

f. Sasaran PNPM Perdesaan

- 1) Masyarakat Miskin.

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang sedang mereka alami untuk bisa mereka atasi secara mandiri.

- 2) Kelembagaan masyarakat di perdesaan.

Kelembagaan masyarakat di perdesaan sangat berperan penting dalam berjalannya proses pemberdayaan masyarakat dan menyampaikan kebutuhannya kepada pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat menyesuaikan serta mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu

lembaga masyarakat di perdesaan sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

3) Kelembagaan Pemerintah Lokal.

Kelembagaan pemerintah lokal merupakan sasaran utama yang membangun program pemberdayaan masyarakat tersebut. Karena kelembagaan pemerintah lokal berfungsi untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat miskin yang aspirasinya telah disampaikan oleh kelembagaan masyarakat di perdesaan.

Salah satu program PNPM Perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah PNPM Perdesaan melalui program Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) yang berada di Nagari Talao Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan.

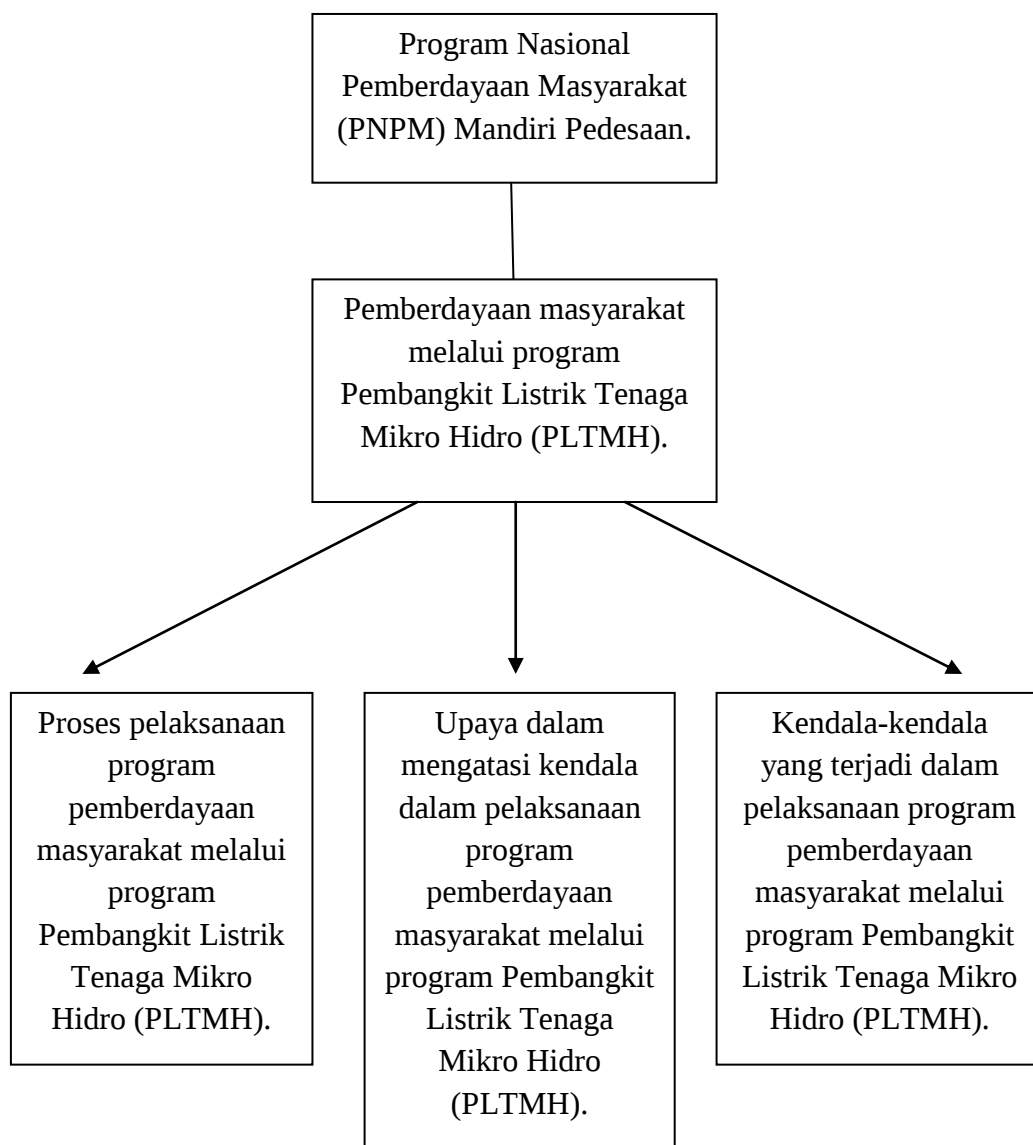
B. Kerangka Konseptual

PNPM Perdesaan merupakan suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh masyarakat dan didanai oleh pemerintah. Namun masih banyak masyarakat belum mengetahui arti dan tujuan dari program PNPM Perdesaan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga program PNPM Perdesaan yang dilaksanakan masih kurang.

Berangkat dari masalah tersebut, pemerintah pusat perlu melakukan perubahan dalam pelaksanaan PNPM Perdesaan baik dalam sosialisasi, pelaksanaan dan manfaat yang timbul sehingga bisa dirasakan

oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi maka PNPM Perdesaan akan menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan suatu konsep yang akan diteliti. Maka berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, kerangka konseptual ini dapat dilihat sebagai berikut :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunit Kabupaten Solok Selatan ialah sebagai bentuk dari program pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di daerah ini belum berjalan dengan baik khususnya pada daerah-daerah yang belum menikmati aliran listrik pada rumahnya. Hal ini terlihat dari tiga komponen dasar pelaksanaan suatu program yaitu proses pelaksanaan, konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan, dan terjadi tidaknya perkembangan diluar perkiraan.

Dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunit terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelestarian kegiatan. Tahapan ini telah berjalan dengan baik. Dalam hal konsistensi dan keberlanjutan masih terkendala dalam hal keberlanjutan hasil kegiatan berupa kurang jujur nya dan borosnya masyarakat dalam memanfaatkan aliran listrik . Penyebabnya adalah kurangnya ketersediaan dana untuk membantu tim pelestarian dalam menjalankan kegiatan. Terkait dengan pelestarian kegiatan, dilakukan semacam himbauan kepada semua lapisan

masyarakat agar mau bersama menjaga hasil kegiatan dengan selalu bersikap hemat dalam memanfaatkan aliran listrik yang telah ada. Dalam hal perkembangan di luar perkiraan, tidak terjadi pengaruh yang mendasar dari lingkungan sekitar.

Pada dasarnya program pemberdayaan masyarakat melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sangat membantu masyarakat selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat menimbulkan inisiatif-inisiatif dari masyarakat itu sendiri untuk menambah penghasilan sehari-hari kehidupan mereka. Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan di Nagari Talao Sungai Kunyit adalah telah diterangnya 70 rumah dan juga termasuk sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan rumah ibadah dan juga masyarakat dapat membuka beberapa jenis usaha seperti Usaha Warung Makanan, Usaha Pengisian Air Minum Isi Ulang, Usaha Warung Nasi, Usaha Bengkel Otomotif dan Usaha Perabot Kayu.

Selama ini sebelum program pemberdayaan masyarakat melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit hanya menggunakan lampu minyak tanah dan genset yang membutuhkan minyak bakar setiap harinya. Hal tersebut membuat masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli bahan bakar minyak hal tersebut tidak

diimbangi oleh penghasilan masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit yang hanya bergantung terhadap hasil kebun dan pertanian. Disamping menggunakan Genset masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit mengandalkan lampu minyak tanah yang rawan kebakaran rumah karena kebanyakan rumah masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit menggunakan dinding papan atau kayu. Untuk bidang sosial budaya dampaknya adalah banyak warga hanya beraktifitas di siang hari karena di malam hari untuk penerangan listrik menjadi kendala. Untuk belajar anak sekolah di malam hari juga menjadi kendala karena kurangnya penerangan listrik di rumah-rumah masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit yang semua itu berdampak pada proses belajar anak sekolah.

Untuk itu diperlukan usaha untuk merubahnya agar masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit mendapatkan aliran listrik secara permanen. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang masuk di Nagari Talao Sungai Kunyit. Warga Nagari Talao Sungai Kunyit menaruh harapan besar pada program pemberdayaan masyarakat dikarenakan melalui program pemberdayaan masyarakat ini cita-cita masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit untuk bisa mendapatkan aliran listrik di rumahnya bisa menjadi kenyataan dan dapat merubah kehidupan dan kesejahteraan hidupnya sehari-hari. Program pemberdayaan masyarakat melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk mendapatkan aliran listrik yang layak dan murah untuk ukuran masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit.

2. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunyit ialah rendahnya minat masyarakat untuk ikut dan berperan aktif dalam musyawarah yang dilaksanakan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK). Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dituntut partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program itu sendiri, lebih mengutamakan musyawarah masyarakat untuk mengemukakan ide dan pendapat sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kendala selanjutnya ialah masih banyaknya warga yang belum memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat masih banyak beranggapan bahwa profesi beladang dan berkebun dapat meningkatkan penghasilan mereka dan tidak bisa memunculkan peluang usaha baru sehingga aliran listrik yang di hasilkan dari program pemberdayaan masyarakat hanya sebagai penerang rumah mereka pada malam hari. Kendala selanjutnya mengapa masyarakat tidak bisa memunculkan ide-ide kreatif dan juga membuka peluang usaha untuk meningkatkan penghasilan mereka dikarenakan sumber dana yang terbatas dan masyarakat telah terbiasa melakukan pekerjaan bercocok tanam seperti berladang dan berkebun. Hal tersebut merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit sehingga

masyarakat tidak bisa begitu saja meninggalkan kebiasaan mereka dalam mencari nafkah sehari-hari yang berasal dari hasil kebun tersebut.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunyit dalam tahap pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pemasangan KWH Meter pada tiap-tiap rumah masyarakat dan memberlakukan sistem biaya beban Rp 10.000,- per bulan dan apabila masyarakat tidak membayar selama 3 bulan maka akan langsung diputus oleh operator Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat lebih sadar dan hemat dalam menggunakan listrik yang mana manfaatnya juga akan dirasakan sendiri oleh masyarakat tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala masih banyaknya warga yang belum memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan kehidupan mereka sehari-hari ialah peran dari Wali Nagari dan tokoh masyarakat dengan terus memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit untuk bisa lebih jeli dalam membuka usaha baru dan tidak hanya fokus terhadap profesi berkebun dan berladang sehingga hasil dari program pemberdayaan masyarakat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit dan bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Talao Sungai Kunyit sebagai alternatif dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, maka antara petugas-petugas pelaksana kegiatan harus menjalin suatu komunikasi yang efektif yang nantinya akan mempermudah hubungan koordinasi antara sesama petugas.
2. Dalam menetapkan usulan kegiatan yang akan didanai pada masa yang akan datang, sebaiknya masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan ide-ide dan gagasan-gagasan agar masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang mereka butuhkan dalam meningkatkan taraf kehidupan hidupnya.
3. Sosialisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) lebih di tingkatkan agar masyarakat lebih mengerti apa dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Community Development teori dan aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan. 2011. *Statistik Daerah Kecamatan Sangir Balai Janggo*.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2006. *Letak Geografis Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan*.
- Bagong Suyanto et al. 2008. *Metode Penelitian Sosial : berbagai pendekatan alternatif*. Jakarta : Kencana.
- Ginajar Kartasasmita. 1995. *Pemberdayaan masyarakat : sebuah tinjauan administrasi*. Malang : Unibraw Press.
- Hadi Prayitno et al. 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta : BPFE
- Isjoni Ishaq. 2002. *Masalah Sosial Masyarakat*. Pekanbaru : Unri Press.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial : Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Gp Press.
- Lexy J Muleong. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta : Erlangga.
- Muslim Kasim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta : Indomedia.
- Nurul Zuriah. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono. 1999. *Pemberdayaan sumber daya*. Jakarta : LAN

Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat : merangkai sebuah kerangka*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sunyoto Usman. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2012

Internet

Konsep kemiskinan. *Indikator Kemiskinan menurut Depsos. 2012. (online)*
<http://dedeirawan32.wordpress.com/2012/04/17/konsep-kemiskinan/>
diakses tanggal 24 Maret 2013.

Program pnpm-perdesaan. *Program pnpm-perdesaan. 2007. (online)*
”<http://www.pnpm-perdesaan.or.id>, diakses 13 Desember 2012.

Program pnpm-perdesaan. *Patanyamang Desa Terisolir yang Terbebas dari Kegelapan. 2011. (online).*
<http://www.pnpmperdesaan.or.id/?page=internews&id=281> diakses 6 Maret 2013.